

**EFEKTIVITAS PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH(LPPD) DI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Uszifaty Dinda Alfhatika

NPP. 31.0666

Asdaf Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur

Prodi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email : [uszifaty1762@gmail.com](mailto:uszifaty1762@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Helwani, S.Ag., M.Pd.I

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** *The Regional Government Implementation Report (LPPD) is prepared as a form of accountability for the performance of regional government administration for one year to the community. The preparation of the LPPD in Berau Regency is carried out by the Governance Section of the Berau Regency Regional Secretariat. In preparing the LPPD, the Governance Section functions as a coordinator whose task is to carry out coordination, collect, process and scrutinize data from regional apparatus as well as compiling the concept of the LPPD book. In reality, the process of preparing the LPPD often encounters difficulties due to changes in regulations from the center that were issued when the LPPD was being prepared.* **Objective:** *This research aims to determine and describe the effectiveness of preparing the Government Administration Report (LPPD) by the Governance Section of the Regional Secretariat of Berau Regency, East Kalimantan Province.* **Methods:** *This research approach uses a qualitative approach with data collection techniques using observation, interviews and documentation, where in interviews, researchers apply a purposive sampling method. The data analysis techniques used in this research include data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.* **Results/Findings:** *The results of the research show that in general the preparation of the Regional Government Administration Report for Berau Regency has been carried out well. However, in the preparation process, especially in the coordination process between related parties, there are obstacles, namely a number of Key Performance Indicators that have not been integrated into regional planning documents. This hampered the preparation process because revisions were needed before the data was collected in the Governance Section of the Berau Regency Regional Secretariat.* **Conclusion:** *The existence of these obstacles means that efforts need to be made by the Governance Section of the Berau Regency Regional Secretariat to increase the effectiveness of the preparation of the Berau Regency LPPD.*

**Keywords:** *LPPD, IKK, Government Department Coordination*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun kepada masyarakat. Penyusunan LPPD di Kabupaten Berau dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau. Dalam penyusunan LPPD tersebut, Bagian Tata Pemerintahan berfungsi sebagai koordinator yang bertugas melaksanakan koordinasi, mengumpulkan, mengolah, dan mencermati data dari perangkat daerah serta menyusun konsep buku LPPD. Pada kenyataannya proses penyusunan LPPD seringkali menemui kesulitan karena adanya perubahan regulasi dari pusat yang terbit saat LPPD sedang disusun. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. **Metode:** Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dimana dalam wawancara, peneliti menerapkan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau telah dilaksanakan dengan baik. Tetapi pada proses penyusunan, khususnya pada proses koordinasi antar pihak terkait terdapat hambatan yakni sejumlah Indikator Kinerja Kunci yang belum terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah. Hal tersebut menghambat proses penyusunan karena perlunya revisi sebelum data dikumpulkan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau. **Kesimpulan:** Adanya hambatan ini mengakibatkan perlu ada upaya yang dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau agar meningkatkan efektivitas penyusunan LPPD Kabupaten Berau.

**Kata Kunci:** LPPD, IKK, Koordinasi Bagian Tata Pemerintahan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Otonomi di pemerintahan daerah dalam penyelenggaraannya haruslah mampu melahirkan pemerintahan yang bersih dari patologi pemerintahan. Contoh dari patologi pemerintahan ialah KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), demi menghindari hal tersebut diperlukan tahap evaluasi pada tiap hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kurun waktu tertentu secara berkala dan berkesinambungan. Melalui evaluasi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah akan diketahui tercapai atau tidaknya indikator yang menentukan tingkat keberhasilan suatu proses penyelenggaraan pemerintahan. Proses ini memerlukan indikator-indikator yang jelas. LPPD digunakan sebagai acuan ukuran kinerja pemerintah daerah yang diukur melalui indikator yang telah termuat dan ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi EPPD, yaitu pemerintah pusat melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui evaluasi terhadap jalannya pemerintahan daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Selain itu, juga didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan

Pelaksana Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019. Pada pasal 6 ayat (5) huruf h di dalam peraturan yang sama merinci tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan terkait dengan tugas koordinasi penyusunan LPPD Kabupaten Berau yang berbunyi “melaksanakan koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau. pada dasarnya secara spesifik proses penyusunan LPPD menjadi rincian tugas yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Perangkat dan Otonomi Daerah yang diterangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Pasal 8 (delapan) ayat (3) huruf e yang berbunyi “melaksanakan pengoordinasian pengumpulan bahan, mengolah data dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta menyampaikannya kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur”.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

LPPD memuat Indikator Kinerja Kunci yang telah ditentukan dalam pedoman penyusunan LPPD yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang kemudian diisi sesuai dengan data dari OPD urusan terkait. Ditemukan fenomena terkait dengan penyusunan LPPD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 dimana Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD belum terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah sehingga program kegiatan, sub kegiatan belum terpetakan secara optimal dan anggaran yang tersedia belum optimal pada beberapa OPD di Kabupaten Berau.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian pertama, dalam konteks efektivitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Arif Siswandi, 2019) dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat daerah masih kurang maksimal. Keterlibatan personil dalam penyusunannya melebihi alokasi staf yang ditugaskan. Dari sisi validitas laporan yang dihasilkan, belumlah sepenuhnya valid.

Penelitian kedua, (Nindy Syafrilla, 2021) yang berjudul Penyusunan LPPD Kota Yogyakarta khususnya di Bagian tata Pemerintahan variabel penelitian ini adalah persiapan LPPD Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2020. Temuan menunjukkan bahwa kapasitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai, waktu penyusunan LPPD yang terbatas, kurangnya pemahaman dari Aparatur Pengawas Intern Pemerintah terhadap proses atau tahapan review LPPD serta penelaahan terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan dokumen pendukung, serta perubahan regulasi terkait dengan pedoman penyusunan LPPD. (Nindy Syafrilla, 2021)

Penelitian ketiga, (Jerico Izal Hazala, 2021) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara umum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung belum berjalan efektif dilihat segi waktu penyusunan, tidak ada atau belum tersedianya data yang diminta dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, pola koordinasi yang belum maksimal, serta ditambahkan faktor penghambat berupaya kurangnya sarana prasarana, kurangnya sumber daya manusia, dan belum adanya *reward and punishment*.

Penelitian keempat, (Irma dkk, 2022) Berdasarkan temuan di lapangan, implementasi kebijakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 di Pemerintah Pangkalpinang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Faktor penghambat antara

lain belum optimalnya komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyampaian informasi kebijakan, kuantitas SDM untuk menyusun berbagai macam laporan kurang memadai, fasilitas pendukung penyusunan LPPD yang belum merata pada masing-masing OPD, belum optimalnya komitmen beberapa OPD terhadap pemenuhan kebutuhan data dan dokumen yang dibutuhkan untuk peningkatan kualitas Indikator Kinerja Kunci (IKK), belum optimalnya koordinasi antar OPD dalam pemenuhan data dan belum tersedianya Standard Operational Procedure (SOP). Faktor Pendukungnya antara lain komunikasi yang baik antara Tim Sekretariat dan petugas penyusun, kualitas SDM penyusun dari segi pendidikan, komitmen yang tinggi dari Tim Sekretariat yang diketuai Sekretaris Daerah dan petugas penyusun.

Penelitian kelima, (Harry Mulya Zein, 2022) menunjukkan bahwa koordinasi yang efektif adalah elemen kunci dalam penyusunan LPPD Kota Ambon. Faktor-faktor kunci dalam koordinasi meliputi komunikasi yang efektif, kesadaran akan pentingnya koordinasi, komitmen dari pihak terkait, kompetensi partisipan, dan insentif koordinasi. Penelitian ini menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dalam penyusunan LPPD untuk mendukung tujuan pembangunan pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian keenam, (Veneranda Moi, 2021) meneliti Determinasi Penghambat Kualitas Penyusunan LPPD Biro Pemeritahan Sekertariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penyusunan LPPD Provinsi NTT sebagai media informasi pertanggung jawaban kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi NTT di pengaruhi beberapa faktor, yaitu; kompetensi sumber daya manusia, evaluasi kinerja mandiri, dan koordinasi.

Penelitian ketujuh, yang menyebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia juga berpengaruh signifikan dan positif bagi kinerja penyedia data LPPD (Fitriani, 2022). Penelitian tersebut dilaksanakan Fitriani di Kabupaten Gowa.

Referensi sebelumnya, seperti (Alfian, 2016), dan (Fauzi, 2019), memberikan gambaran tentang pentingnya evaluasi kinerja pemerintah daerah dan kualitas laporan yang berkaitan dengan administrasi pemerintah daerah.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana lokus penelitian yang dilakukan yakni Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur tepatnya pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau. Pada bagian teori dan metode, digunakan dimensi dan metode yang relatif sama yaitu Input, Proses, dan Output. metodenya yang digunakan ialah metode pendekatan induktif dan dituangkan dengan cara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan efektivitas penyusunan LPPD di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini untuk mengetahui gambaran jelas mengenai efektivitas penyusunan LPPD di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.

## **II. METODE**

Menurut (Moleong, 2018) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

memanfaatkan berbagai metode alamiah. Selanjutnya pendekatan induktif dijelaskan oleh (Simangunsong, 2017) "Pendekatan induktif merupakan pendekatan dimana setiap fenomena/gejala mengacu pada keadaan di lapangan sehingga peneliti perlu melengkapi diri dengan alat perekam atau sejenisnya".

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan informan untuk mengumpulkan data dan informasi, Kemudian untuk memperoleh data dan informasi terkait penyusunan LPPD di Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Berau, peneliti mengumpulkan sumber dari 3 aspek yakni *person, place, dan paper* (Simangunsong, 2017). Data yang diperoleh dibedakan menjadi data primer dan data sekunder menurut jenis sumber datanya. (Arikunto, 2010). Data primer berupa hasil wawancara dan observasi yang lakukan, kemudian data sekunder berwujud dokumen LPPD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023, dokumen Berau Dalam Angka 2023, pelaporan IKK dari Dinas Pendidikan Kabupaten Berau untuk nilai IKK dalam LPPD dan dokumen lain dalam bentuk fisik maupun digital.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis menganalisis dan menyampaikan data serta informasi yang telah terkumpul sesuai dengan pokok permasalahan dan merujuk pada landasan teori yang ditetapkan.

#### 3.1 Efektivitas Penyusunan LPPD Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

Pada penelitian ini, untuk mengetahui efektif atau tidaknya penyusunan LPPD di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau, diperlukan tolak ukur yang dijadikan acuan dalam penilaian yakni teori (Steers, 2000) dalam (Nurhasanah, 2020) yang mencakup dimensi dan indikator di dalam sebuah penelitian. Dimensi dan indikator yang digunakan peneliti untuk mengukur efektivitas penyusunan LPPD Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

- A. *Input*; dengan indikator; 1) Dana/ anggaran; 2) Sumber daya manusia; 3) Sarana dan Prasarana; 4) Dasar Hukum.
- B. *Proses*; dengan indikator 1) Ruang lingkup; 2) Mekanisme Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3) Koordinasi antar pihak terkait; 4) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- C. *Output*; dengan indikator yang diharapkan untuk tercapai ialah dihasilkan LPPD Kabupaten Berau yang memuat data valid, akuntabel, dan akurat.

#### A. INPUT

Input suatu sistem merujuk pada atau data informasi yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut untuk diproses atau diolah.

1. **Dana atau anggaran** adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks keuangan, baik dalam skala individu, organisasi, maupun pemerintah. DPA Bidang Sekretariat Daerah program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat kegiatan administrasi tata pemerintahan sebesar Rp.420.000.000 (tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu pelaksanaan mulai dari bulan Januari hingga Desember tahun 2023. anggaran untuk proses penyusunan LPPD Kabupaten Berau telah dipergunakan sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran dan dana untuk penyusunan LPPD di Kabupaten Berau telah efektif.
2. **Sumber Daya Manusia (SDM)** dalam konteks organisasi pemerintahan merujuk pada karyawan atau pegawai yang bekerja di berbagai departemen atau unit pemerintah.

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Berau bertanggung jawab dalam tugasnya untuk melaksanakan konsolidasi dan koordinasi sehingga menemukan dan mengkompilasi Data Kinerja dan Data Dukung terkait IKK. Selain itu, Bagian Tata Pemerintahan juga bertugas untuk melaksanakan penginputan Data Kinerja dan mengupload data dukungnya kepada SILPPD.

**Tabel 3.1**  
**Daftar Nama Pegawai Bagian Tata Pemerintahan**  
**Setda Kabupaten Berau Tahun 2024**

<b>NO</b>	<b>Nama / NIP</b>	<b>Jabatan</b>
1	H. H SYAFRI, S.Sos, MM NIP. 196805281998031005	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
2	JOKO FITRIYANTO, SSTP NIP. 198506252003121002	Analisis Kebijakan Ahli Muda
3	HELMADAWATI, SE NIP. 198811302011011002	Analisis Kebijakan Ahli Muda
4	MUHAMMAD ZAINUL MUTTAQIN, S.Sos NIP. 197711111998031003	Analisis Kebijakan Ahli Muda
5	EDI GUNAWAN, SE NIP.197610042007011008	Penata Kelola Pemerintahan
6	YAZID FAHRI, SSTP NIP.197208052007012023	Penata Kelola Pemerintahan
7	AGUSTINAH, SE NIP. 197302082007011014	Penata Kelola Pemerintahan
8	JULIANSYAH, SE NIP. 198001012007011023	Penata Kelola System & TI
9	NOOR ASOBAN, SE NIP. 197504172010012009	Penata Kelola Pemerintahan
10	MARJONI, S.IP NIP. 198510092009011001	Penelaah Teknis Kebijakan
11	SUPRIANSYAH NIP. 198303292010011025	Pengadministrasian Perkantoran
12	Ramli BNIP. 19730310200604202	Pengadministrasian Perkantoran
13	Dwi Bayu Aditya Warman NIP. 199505272017081002	Pengadministrasian Perkantoran
14	Muliyanto, SP NIP. -	Pegawai Tidak Tetap
15	Nina Beba Sari, SE NIP.-	Pegawai Tidak Tetap
16	Hijrah Saputra Istyanto, S.Sos. NIP. -	Pegawai Tidak Tetap

17	Rusliana NIP. -	Pegawai Tidak Tetap
----	--------------------	---------------------

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 (Diolah peneliti, 2024)

3. **Sarana Prasarana.** Sarana prasarana yang terdapat di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Berau dapat dilihat dalam Kartu Inventaris Ruang pada gambar di bawah:

**Gambar 3.1**  
**Kartu Inventaris Ruang pada Bagian Tata Pemerintahan**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Berau**

Ruangannya		: Bagian Tata Pemerintahan								No. KODE LOKASI : 12.23.02.-04.01.01.01				
No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Jumlah Barang/ Register	Harga Beli/ Perolehan	Keadaan Barang			Keterangan	
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB) Tidak Ada (TA)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Mesin Ketik Elektronik	Nakazima			Besi	2017	02.06.01.01.08.00.02	1	3.000,00	1	1	0	Bag. Tapem	
2	Alat Penghancur Kertas	Score Maxi 34 CCM			Besi/Plastik	2015	02.06.01.05.05.0004	1	7.750,00	1	0	0	Bag. Tapem	
3	AC Split	Panasonic		1 Pk	Besi/Plastik	2019	02.06.02.04.004	1	6.395,00	1	0	0	Bag. Tapem	
4	AC Split	Panasonic		1/2 Pk	Besi, Plastik	2019	02.06.02.04.004	1	5.895,00	1	0	0	Bag. Tapem	
5	AC Split	Polytron		2 Pk	Besi, Plastik	2023		1		1	0	0	Bag. Tapem	
6	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z			Besi Campuran	2009	1.3.2.02.001.004.001	1	15.700,00	0	1	0	Bag. Tapem (Edi Gunawan)	
7	Wireless	Weston			Besi, Plastik	2017	02.06.02.06.012	1	2.000,00	1	0	0	Bag. Tapem	
8	PC. Unit	Hp All In One/20-R0231			Besi, Plastik	2016	02.06.03.02.001	1	12.200,00	1	0	0	Bag. Tapem	
9	PC. Unit	PC All In Asus			Besi, Plastik	2017	02.06.03.02.001	1	11.260,00	1	0	0	Bag. Tapem	
10	PC. Unit	Asus			Besi, Plastik	2019	02.06.03.02.001	1	14.500,00	1	0	0	Bag. Tapem	
11	Note Book	Avidio MyBook Pro K5 (8N2)		Core i5-8250U,Memory	Besi, Plastik	2022		4	48.800,00	4	0	0	Bag. Tapem (Joko, Yazid,	
12	Lap Top	Laptop/Intel Core i5 Ram 4 GB			Besi, Plastik	2015	1.3.2.10.001.002.003	1	10.120,00	1	0	0	Bag. Tapem	
13	Note Book	APPLE/Macbook Air M/MVG2			Besi, Plastik	2015	02.06.03.02.03.0124	1	24.600,00	1	0	0	Bag. Tapem	
14	Hard Disk	Seagate/Expansion			Besi, Plastik	2018	1.3.2.10.002.001.003	1	1.370,00	1	0	0	Bag. Tapem	
15	Printer	Epson L 800			Plastik	2015	1.3.2.10.002.003.003	3	14.250,00	3	0	0	Bag. Tapem	
16	Printer	Epson/L365			Besi, Plastik	2016	1.3.2.10.002.003.003	1	4.300,00	1	0	0	Bag. Tapem	
17	Printer	Epson L565			Besi, Plastik	2017	1.3.2.10.002.003.003	2	10.850,00	2	0	0	Bag. Tapem	
18	Printer	Epson/L120			Plastik	2018	1.3.2.10.002.003.003	2	3.980,00	2	0	0	Bag. Tapem	
19	Printer	Canon/G3010			Besi, Plastik	2019	1.3.2.10.002.003.003	1	3.500,00	1	0	0	Bag. Tapem	
20	Scanner	Scanner PLUSTEK Smart Office P5283			Plastik	2015	02.06.03.04.10.0016	1	13.500,00	1	0	0	Bag. Tapem	
21	Scanner	Plustek/PS406U Plus		600 dpi	Besi, Plastik	2019	02.06.03.04.010	1	14.925,00	1	0	0	Bag. Tapem	
22	Meja Kerja	Garvani Callista 1800 LD			Kayu	2018	02.06.04.01.010	1	4.390,00	1	0	0	Pengadaan Keuangan	
23	Projektor + Attachment	Projektor			Besi, Plastik	2013	02.07.01.01.003	1	13.875,00	1	0	0	Bag. Tapem	
24	Projektor + Attachment	Epjson EB 2065			Besi, Plastik	2017	02.07.01.01.003	1	31.850,00	1	0	0	Bag. Tapem	
25	Peralatan Studio Visual Lain-lain	Layar Proyektor			Besi, Plastik	2013	02.07.01.01.082	1	1.937,00	1	0	0	Bag. Tapem	
26	Mesin Foto Copy	Canon Imagrunner 2520			Plastik			1		1	0	0	Bag. Tapem	
27	Notebook	SPC Notebook X1 15G115256M8		Intel Core i5-1135G7Ma	Besi, Plastik	2023		1	7.950,00	1	0	0	Bag. Tapem (Noor Asobah)	
28	Scanner	Epson WorkForce DS-410			Besi, Plastik	2023		1	7.990,00	1	0	0	Bag. Tapem (M.Zainul)	
29	Printer	Epson L 5290			Besi, Plastik	2023		1	5.660,00	1	0	0	Bag. Tapem (M.Zainul)	
30	PC All In	Asus V222FAK-BA542W			Besi, Plastik	2023		1	11.650,00	1	0	0	Bag. Tapem (M.Zainul)	
31	Printer	Epson L5290			Besi, Plastik	2023		1	56.600,00	1	0	0	Bag. Tapem (Joko)	
32	Hardisk	SSD Internal Vgen SATA 3512 GB			Besi, Plastik	2023		1	220.000,00	1	0	0	Bag. Tapem (Joko)	
33	Printer Canon	Canon TA-5300			Besi, Plastik	2023		1	94.500,00	1	0	0	Bag. Tapem	
34	GPS Geodetik	RTK CHC 150			Besi, Plastik	2023		1	124.700,00	1	0	0	Bag. Tapem	
35	Dji Mavic	3 Fly More Combo Dji RC Pro			Besi, Plastik	2023		1	84.000,00	1	0	0	Bag. Tapem	
36	Global Positioning System	Suuto Trverse Alpha			Besi, Plastik	2017	1.3.2.03.003.001.033	1	13.350,00	1	0	0	Bag. Kerjasama Barang Ada	
37	Global Positioning System	Suuto Trverse Alpha			Besi, Plastik	2017	1.3.2.03.003.001.033	1	13.350,00	1	0	0	Bag. Kerjasama Barang Ada	
38	Global Positioning System	Garmin GPSMAP		64sc 645/C- GPS	Besi, Plastik	2019	1.3.2.03.003.001.033	3	48.000,00	3	0	1	Bag. Kewilayahan Barang	
39	Televisi	Sharp		21 Inch	Besi, Plastik	2012	1.3.2.05.002.006.003	1	1.650,00	1	0	0	Ex. Bag. Pemerintahan	
40	Camera Video	CCTV			Besi, Plastik	2013	1.3.2.05.002.006.003	1	1.750,00	0	0	1	Barang Tidak Ada	
41	Camera Video	Nikon/J5 10-30			Besi, Plastik	2019	1.3.2.05.002.006.003	2	15.800,00	1	0	0	Bag. Kerjasama	
42	Handy Cam	Sony/Projektor Full HD HDR-PJ410		16 GB+EOS+Mini+Tripod	Besi, Plastik	2019	1.3.2.02.001.004.048	2	19.500,00	1	0	1	Bag. Kerjasama Barang ada 1	
43	Layar Film/Projektor	Projektor			Besi, Plastik	2013	1.3.2.06.001.002.005	1	12.800,00	0	0	1	Ex. Bag. Pemerintahan	
44	Alat Studio Pemetaan lainnya	Camera Dron Mavic 2 Pro/Fly More Kit			Besi, Plastik	2020	1.3.2.06.001.005.053	1	38.150,00	1	0	0	Bag. Kerjasama Barang ada	
45	Handy Talky (HT)	Motorola/CP 1660/CP 1660 VHF			Besi, Plastik	2019	1.3.2.06.002.001.006	2	9.800,00	2	0	0	Bag. Kerjasama Barang Dan	
46	Pc. Unit	PC All In Asus			Besi, Plastik	2017	1.3.2.10.001.002.001	1	11.260,00	1	0	0	Bag. Kerjasama Dan	
47	Lap Top	Asus Rog G752VM-GC344T			Besi, Plastik	2017	1.3.2.10.001.002.003	1	39.400,00	1	0	0	Bag. Kerjasama Barang Ada	
48	Printer (Peralatan Personil	Epson L 1300			Besi, Plastik	2017	1.3.2.10.002.003.003	1	9.600,00	1	0	0	Bag. Kerjasama Barang Ada	
49	Printer (Peralatan Personil	Epson/L 565			Besi, Plastik	2017	1.3.2.10.002.003.003	1	5.237,73	1	0	0	Bag. Perbatasan Wilayah	
50	Printer (Peralatan Personil	Epson L 310			Plastik	2018	1.3.2.10.002.003.003	1	2.225,30	1	0	0	Pengadaan Keuangan dan	
51	Printer (Peralatan Personil	Epson/HF 1100			Plastik	2019	1.3.2.10.002.003.003	2	14.850,00	2	0	0	Bag. Kerjasama Barang Ada	
52	Kendaraan Roda 2	Honda Vario			Besi Campuran	2023		1		1	0	0	Bag. Tapem (M.Zainul)	
53	Kendaraan Roda 4	Mobil Rush			Besi Campuran	2023		1		1	0	0	Bag. Tapem	
54	Kendaraan Roda 4	Mobil Hilux			Besi Campuran	2023		1		1	0	0	Bag. Tapem	
55														
56														

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Berau (2024)

Sarana prasarana yang ada sudah maksimal guna mendukung kinerja Bagian Tata Pemerintahan untuk menyusun LPPD Kabupaten Berau.

4. **Dasar Hukum.** Landasan hukum wajib bagi kegiatan administratif pemerintah. Dasar hukum atau aturan yang berlaku pada penyusunan LPPD Kabupaten Berau telah efektif, karena Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah sudah berdasarkan aturan yang berlaku yaitu mengacu pada:
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - SK Tim Penyusun LPPD Kabupaten Berau yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## B. PROSES

Proses adalah tahapan pengolahan dari data awal yang diperoleh (*input*) dan pada proses penyusunan peneliti menggunakan indikator diantara ruang lingkup, mekanisme penyusunan LPPD, dan koordinasi antar pihak terkait.

1. **Ruang Lingkup.** Menurut pedoman umum penyusunan LPPD tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada 7 Januari 2024, ruang lingkup LPPD secara garis besar ialah laporan yang memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas:
  1. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:
    1. Capaian Kinerja Makro.
    2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
    3. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah DaerahTak hanya substansi di atas, LPPD juga berisi laporan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang memuat hasil capaian penerapan SPM, ketersediaan anggaran dalam penerapannya, kendala penerapan SPM tersebut.
  2. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Dalam upaya meninjau kelengkapan isi LPPD, penulis mencocokkan cakupan capaian penyelenggaraan kinerja di dalam LPPD Kabupaten Berau Tahun 2023 yang rilis pada tahun 2024 sebagai berikut:



## Gambar 3.2 Kelengkapan Isi LPPD Kabupaten Berau 2023

Pemerintah Kabupaten Berau

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i

PERNYATAAN TELAH DIREVUI ..... iii

DAFTAR ISI ..... iv

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

1.1. Latar Belakang ..... 1

1.1.1. Penjelasan Umum ..... 4

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah ..... 36

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal ..... 102

**BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH** ..... 116

2.1. Capaian Kinerja Makro ..... 116

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ..... 116

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome) ..... 117

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output) ..... 128

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan ..... 159

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ..... 161

**BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN** ..... 186

**BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL** ..... 186

4.1. Urusan Pendidikan ..... 186

4.2. Urusan Kesehatan ..... 196

4.3. Urusan Pekerjaan Umum ..... 219

4.4. Urusan Perumahan Rakyat ..... 228

4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ..... 235

4.6. Urusan Sosial ..... 251

**BAB V PENUTUP** ..... 272

Pemerintah Kabupaten Berau

BAB II

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pada tahun Anggaran 2023, Capaian Kinerja Makro pada Kabupaten Berau dapat digambarkan dalam table berikut:

Table II.1  
Capaian Kinerja Makro pada Kabupaten Berau TA. 2023

NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2023	LAJU KINERJA 2023	SATUAN
1	Indeks Pembangunan Manusia	Laju Indeks Pembangunan Manusia	70,24	70,71	0,06	%
2	Angka Kemiskinan	Laju Angka Kemiskinan	5,85	5,54	-0,31	%
3	Angka Pengangguran	Laju Angka Pengangguran	5,02	4,85	-0,17	%
4	Perubahan Ekstrem	Laju Perubahan Ekstrem	2840835,9	3070833,94	5,44	%
5	Pendapatan Per-Kapita	Laju Pendapatan Per-Kapita	236,22	493,53	-0,55	%
6	Ketimpangan Pendapatan	Laju Ketimpangan Pendapatan	0,332	0,327	-0,02	%

Sumber Data : BPS Kab. Berau

Pemerintah Kabupaten Berau

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Manajemen pembangunan berbasis kinerja merupakan orientasi untuk mendorong perubahan dimana program atau kegiatan dan sumber anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan yang baik pada hasil (outcome) yang ingin dicapai, keluaran (output) maupun dampak dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026 pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperganikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja;

Tabel 2.5  
Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Keberhasilan Kinerja	Indikator Keberhasilan	Satuan	Target
Memperbaiki Kualitas dan Kualitas Anggaran Pembelian	1. Memperbaiki kualitas dan kualitas anggaran pembelian	tahun	100%
	2. Memperbaiki kualitas dan kualitas anggaran pembelian	tahun	100%
Memperbaiki Kualitas dan Kualitas Anggaran Pembelian	3. Memperbaiki kualitas dan kualitas anggaran pembelian	Periode	100%
	4. Memperbaiki kualitas dan kualitas anggaran pembelian	Periode	100%
Memperbaiki Kualitas dan Kualitas Anggaran Pembelian	5. Memperbaiki kualitas dan kualitas anggaran pembelian	Periode	100%
	6. Memperbaiki kualitas dan kualitas anggaran pembelian	Periode	100%
Memperbaiki Kualitas dan Kualitas Anggaran Pembelian	7. Memperbaiki kualitas dan kualitas anggaran pembelian	Periode	100%
	8. Memperbaiki kualitas dan kualitas anggaran pembelian	Periode	100%
Memperbaiki Kualitas dan Kualitas Anggaran Pembelian	9. Memperbaiki kualitas dan kualitas anggaran pembelian	Periode	100%
	10. Memperbaiki kualitas dan kualitas anggaran pembelian	Periode	100%
Memperbaiki Kualitas dan Kualitas Anggaran Pembelian	11. Memperbaiki kualitas dan kualitas anggaran pembelian	Periode	100%
	12. Memperbaiki kualitas dan kualitas anggaran pembelian	Periode	100%
Memperbaiki Kualitas dan Kualitas Anggaran Pembelian	13. Memperbaiki kualitas dan kualitas anggaran pembelian	Periode	100%
	14. Memperbaiki kualitas dan kualitas anggaran pembelian	Periode	100%
Memperbaiki Kualitas dan Kualitas Anggaran Pembelian	15. Memperbaiki kualitas dan kualitas anggaran pembelian	Periode	100%
	16. Memperbaiki kualitas dan kualitas anggaran pembelian	Periode	100%
Memperbaiki Kualitas dan Kualitas Anggaran Pembelian	17. Memperbaiki kualitas dan kualitas anggaran pembelian	Periode	100%
	18. Memperbaiki kualitas dan kualitas anggaran pembelian	Periode	100%
Memperbaiki Kualitas dan Kualitas Anggaran Pembelian	19. Memperbaiki kualitas dan kualitas anggaran pembelian	Periode	100%
	20. Memperbaiki kualitas dan kualitas anggaran pembelian	Periode	100%

LPPD – Kab. Berau Tahun Anggaran 2023      BAB II – halaman 161

Pemerintah Kabupaten Berau

BAB III

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Pada tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Berau tidak menerima dan melaksanakan tugas pembantuan baik dari Pemerintah maupun dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

LPPD – Kab. Berau Tahun Anggaran 2023      BAB III – halaman 186

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Berau. (Diakses pada 2 April 2024 oleh peneliti)

2. **Mekanisme Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.** Berdasarkan panduan yang diterbitkan oleh Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal dalam Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023. Mekanisme penyusunan LPPD Kabupaten Berau telah sesuai dan efektif.

**Tabel 3.2**

**Jadwal Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

No	Tahapan	Waktu	Keterangan
1	Pembentukan tim penyusun dan tim <i>pereview</i>	Minggu keempat Desember	
2	Pengumpulan data dan dokumen pendukung oleh perangkat daerahpelaksana urusan pemerintah kepada Sekretariat Tim Penyusun LPPD	Minggu pertama Januari	
3	Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (rancangan awal LPPD)	Minggu kedua Januari	
4	Pelaksanaan verifikasi oleh Tim <i>Pereview</i> a) Penyampaian rancangan LPPD kepada APIP b) Pelaksanaan <i>Review</i> oleh APIP c) Penyampaian Catatan Hasil <i>Review</i> kepada sekretariat Tim Penyusun LPPD	Minggu ketiga s/d keempat Januari	
5	Penyusunan Rancangan LPPD berdasarkan Catatan Hasil <i>Review</i> (rancangan akhir LPPD)	Minggu pertama Februari s/d Minggu Keempat Februari	
6	Penetapan Dokumen LPPD	Minggu Pertama s/d Keempat Maret	Paling Lambat
7	Penyampaian LPPD	31 Maret	Paling Lambat

Sumber: Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023 oleh Dirjen Otda Mendagri (Diolah oleh Peneliti, 2024)

**Tabel 3.3**

**Jadwal Tentative Penyusunan LPPD Kabupaten Berau Tahun 2023**

NO	KEGIATAN	WAKTU
1	Pengarahan Penjelasan Teknis Penyusunan LPPD	8 Januari 2024
2	Penyampaian data & Dokumen Pendukung dari OPD melalui Bagian Tata Pemerintahan	Minggu ke-3 Januari 2024
3	Rakortek	Minggu ke-4 Januari 2024
4	<i>DESK</i> Verifikasi & <i>Editing</i> oleh Biro Tata Pemerintahan	Minggu ke-1 Februari 2024

5	Review oleh Inspektorat	Minggu ke-3 sd ke 4 Februari 2024
6	Tindak lanjut dan perbaikan	Minggu ke-1 sd ke 2 Maret 2024
7	Permohonan Tanda Tangan Gubernur	Minggu ke-3 Maret 2024
8	Cetak Buku LPPD	Minggu ke-3 Maret 2024
9	Upload di SILPPD/Pengiriman LPPD ke Kemendagri	Minggu ke-4 Maret 2024

Sumber: *Pointer* Rapat Persiapan Penyusunan LPPD di Kantor Setda Kabupaten Berau pada tanggal 8 Januari 2024 (Diolah oleh peneliti, 2024)

3. **Koordinasi Antar Pihak Terkait.** Koordinasi antar pihak terkait merujuk pada proses pengelolaan atau pengaturan kerjasama dan komunikasi antara berbagai entitas atau individu yang memiliki keterkaitan atau kepentingan dalam suatu konteks tertentu. Dalam hal ini adalah proses pengelolaan data dari OPD yang diserahkan kepada Bagian Tata Pemerintahan untuk disusun dalam LPPD. koordinasi antar pihak terkait belum diselenggarakan secara efektif, Hal ini dapat dicermati dari kurang maksimalnya koordinasi yang terjalin antara penyusun LPPD pada Bagian Tata Pemerintahan dengan pihak OPD.
4. **Pelaksanaan Penyusunan LPPD di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.** Pada tahap penyusunan LPPD, Bagian Tata Pemerintahan menemui masalah atau hambatan dalam hal koordinasi antar pihak terkait, dimana kurangnya koordinasi tersebut mengakibatkan beberapa IKK yang belum terintegrasi dalam dokumen perencanaan OPD tertentu sehingga menghambat proses pengumpulan dan penyusunan data LPPD Kabupaten Berau Tidak ada kendala dalam ketepatan waktu pengumpulan LPPD Kabupaten Berau yang telah disusun, namun terdapat faktor yang menghambat kelancaran kinerja sehingga waktu pengerjaan belum dilaksanakan secara efektif sesuai acuan jadwal karena mesti diadakan perbaikan ulang jika data/dokumen yang diserahkan dari OPD kepada Bagian Tata Pemerintahan belum sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD terbaru.

### C. OUTPUT


Indikator *Output* dilihat dari tersusunnya LPPD Kabupaten Berau. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau yang disusun oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Berau harus memuat data yang valid, akurat dan akuntabel. Data yang valid, akurat dan akuntabel dapat dilihat dari keselarasan antara data yang dikumpulkan oleh OPD dengan yang dicantumkan oleh Bagian Tata Pemerintahan ke dalam LPPD Kabupaten Berau. Untuk itu penulis meninjau dengan membandingkan statistik yang tertera di dalam laporan dengan dengan dokumen-dokumen yang membuat laporan tersebut terbukti valid, akurat dan akuntabel seperti yang dapat dilihat di dalam gambar di bawah ini:

**Gambar 3.3**  
**Perbandingan Indikator Kinerja Kunci Makro pada LPPD Kabupaten Berau 2023 dengan data laporan dari BPS Kabupaten Berau**

Tabel 1.1 Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Berau, 2022-2023

No	Indikator Ekonomi Makro	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	74,88	75,19	75,69	76,24	76,71
2	Angka Kemiskinan	Persen	5,04	5,19	5,88	5,65	5,54
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,95	5,08	5,82	5,02	4,95
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,63	-3,32	5,36	3,95	5,44
5	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	173,83	143,67	171,49	236,23	198,53
6	Ketimpangan Pendapatan ( <i>Gini Ratio</i> )	-	0,345	0,3	0,377	0,352	0,327

Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, 2024




**Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Berau**  
 Jalan Mangga II Nomor 53 77311 Telp. : (0554) 21541  
 Homepage : www.beraukab.bps.go.id E-mail : bps6405@bps.go.id

Indikator Kinerja Makro


No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,88	75,19	75,69	76,24	76,71
2	Kemiskinan	5,04	5,19	5,88	5,65	5,54
3	Pengangguran	4,95	5,08	5,82	5,02	4,95
4	Gini Ratio	0,345	0,300	0,377	0,352	0,327

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau



Tanjung Redeb, 28 Februari 2024  
 Supriyanto, SST  
 NIP. 197107311994011001

---




**Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Berau**  
 Jalan Mangga II Nomor 53 77311 Telp. : (0554) 21541  
 Homepage : www.beraukab.bps.go.id E-mail : bps6405@bps.go.id

INDIKATOR KINERJA MAKRO KABUPATEN BERAU

IV. Pertumbuhan Ekonomi

Konsep/Definisi	Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan, khususnya dengan menggunakan PDB/PDRB.			
	Terdapat 2 (dua) jenis PDB/PDRB : a. Atas dasar harga berlaku - Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun. PDRB atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi b. Atas dasar harga konstan - Atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun sebagai dasar. PDRB atas harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun-tahun			
Data/Informasi yang Digunakan	PDRB atas Harga Konstan pada tahun pelaporan (n) dan tahun sebelumnya (n-1)			
Sumber data	BPS			
ISI AN DATA	TAHUN 2022	TAHUN 2023	RUMUS	
	29.940.835,51	31.570.052,92	$\frac{\text{Capaian kinerja makro tahun pelaporan} - \text{capaian kinerja makro tahun sebelumnya}}{\text{Capaian kinerja makro tahun sebelumnya}} \times 100\%$	
			PERUBAHAN (%)	
			5,44	

Laman Akses:  
<https://beraukab.bps.go.id/pressrelease/2024/02/28/116/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-berau-menurut-pengeluaran-tahun-2023.html>



Tanjung Redeb, 28 Februari 2024  
 Supriyanto, SST  
 NIP. 197107311994011001

**Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Berau**  
Jalan Mangga II Nomor 53 77311 Telp. : (0554) 21541  
Homepage : www.beraukab.bps.go.id E-mail : bps405@bps.go.id

**INDIKATOR KINERJA MAKRO KABUPATEN BERAU**  
V. Pendapatan/pdrb Per Kapita

Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat kenaikan pendapatan per kapita daerah yang bersangkutan. Terdapat 2 (dua) metode penghitungan :  
a. PDRB Per Kapita Nominal (berdasarkan harga berlaku) yang tidak mempertimbangkan tingkat inflasi atau kenaikan harga  
b. PDRB Per Kapita Riil (berdasarkan angka konstan) yang dihitung berdasarkan harga tetap sebagai acuan.

Data/Informasi yang Digunakan : PDRB Per Kapita atas Harga Berlaku pada tahun pelaporan (n) dan tahun sebelumnya (n-1)  
Sumber data : BPS

ISIAN DATA	TAHUN 2022	TAHUN 2023	RUMUS	PERUBAHAN (%)
			$\frac{\text{Capaian kinerja makro tahun pelaporan} - \text{capaian kinerja makro tahun sebelumnya}}{\text{Capaian kinerja makro tahun sebelumnya}} \times 100\%$	
	236,23	198,53		-15,96%

Tanjung Pede, 28 Februari 2024  
Kepala  
Suryanto SST  
NIP. 197107311994011001

Sumber: SILPPD Kabupaten Berau

Pada gambar di atas disebutkan nilai dari Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Berau tahun 2023 dimana Indeks Pembangunan Manusia sebesar 76,71 , angka kemiskinan sebesar 5,54 %, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,95 %, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44%, PDRB Per Kapita sebesar 198.530.000 juta rupiah, dan ketimpangan pendapatan (ratio gini) sebesar 0,327. Angka-angka yang tercantum di dalam LPPD Kabupaten Berau tahun 2023 ini sudah sesuai dengan yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

**Gambar 3.4**  
**Lampiran hasil EPPD 2024 pada IKK Outcome**  
**Urusan Pendidikan LPPD Kabupaten Berau TA 2023**

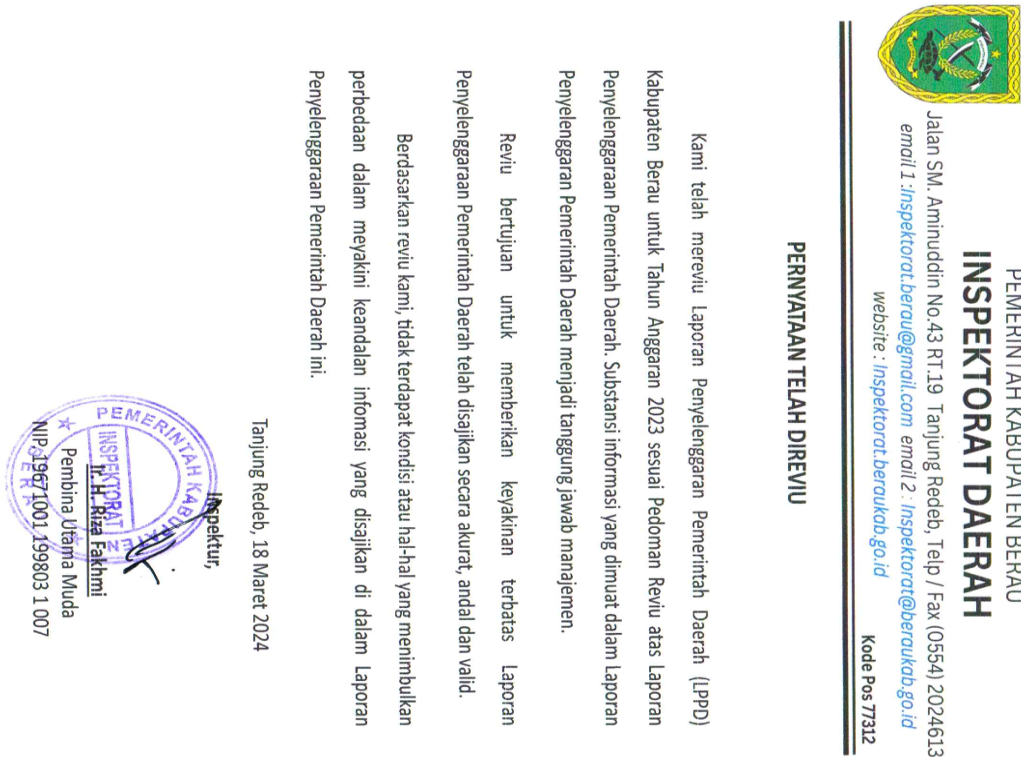
No.	INDEKS	FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Data LPPD 2023 Isian TIMDA	Capaian Kinerja	Status Evaluasi APIP Provinsi	Catatan Permasalahan
B.	INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	8.628	77,43	OKE	
				Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi bersangkutan	11.143				
			1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang belajar di sekolah dasar	33.731	98,07	OKE	
				Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi bersangkutan	34.396				
			1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang belajar di sekolah menengah pertama	13.328	82,21	OKE	
				Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan	16.213				
			1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat/ sedang belajar di pendidikan kesetaraan	672	23,29	OKE	
Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan	2.885								

Sumber: Lampiran Hasil EPPD Kabupaten Berau tahun 2024 melalui SILPPD Kabupaten Berau

Dalam gambar dan tabel di atas menjelaskan ada 21 IKK Outcome yang mendapatkan nilai "TIDAK OKE", dan 105 IKK Outcome dengan nilai "OKE" karena alasan sesuai dengan

yang tertera di dalam tabel di atas berdasarkan hasil evaluasi dari tim EPPD tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya sejumlah ketidakakuratan dalam pengisian IKK yang mengakibatkan hal tersebut terjadi. Aspek berikutnya berkaitan dengan akuntabilitas dari LPPD Kabupaten Berau yang telah disusun. Akuntabilitas dapat dibuktikan dengan surat pernyataan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Berau pada gambar di bawah ini:

**Gambar 3.5**  
**Pernyataan Telah Direview Inspektorat Kabupaten Berau terhadap LPPD Kabupaten Berau TA 2023**



Sumber: SILPPD Kabupaten Berau

Pernyataan telah *direview* yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Berau ini, sesuai dengan yang tertulis didalamnya bahwa "*review* bertujuan untuk memberikan keyakinan atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid." Dikeluarkannya surat pernyataan tersebut menjadi dasar bahwa LPPD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 dapat dipertanggungjawabkan informasi di dalamnya.

**3.2 Faktor Penghambat Dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur**

(Moenir, 2008:125) mengutarakan dua faktor yakni segi sarana prasarana dan segi manusia. Melalui pengamatan atau observasi, peneliti menemukan bahwa tim penyusun LPPD bekerja pada Gedung kantor yang memadai dan terorganisir dengan baik sehingga mampu memberikan lingkungan nyaman bagi pegawai untuk bekerja. Pada gedung juga dilengkapi dengan

fasilitas jaringan nirkabel (*Wifi access*), komputer bagi masing-masing pegawai tim penyusun. Dukungan dari lingkungan kerja yang nyaman dan jaringan komunikasi yang terjamin dimanfaatkan dengan baik oleh tim penyusun sehingga penyusunan LPPD dapat terselenggara tiap tahunnya tepat waktu. Dari segi manusia, peneliti menemukan bahwa ada faktor dari pegawai yang menyebabkan hambatan yang terjadi seperti di bawah ini:

1. **Indikator Kinerja Kunci yang Belum Terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan Daerah.** Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menerima informasi bahwa faktor terbesar penghambat penyusunan LPPD ialah apabila IKK (Indikator Kinerja Kunci) tidak masuk dalam dokumen perencanaan daerah. Dokumen daerah yang dimaksud contoh diantaranya adalah Renstra, RPJMD, RKA, DPA. Jika dokumen daerah belum memuat IKK yang sesuai ketentuan pedoman penyusunan LPPD, maka hal ini menyebabkan bagian tata pemerintahan akan kekurangan fasilitas untuk Menyusun LPPD secara efektif dan efisien sesuai target.
2. **Koordinasi yang Belum Maksimal Antara Pihak Tim Penyusun dan Pihak OPD terkait.** Tidak terintegrasinya IKK dalam dokumen perencanaan daerah berkaitan dengan faktor sumber daya manusia akibat kompleksitas kebijakan dan kurangnya koordinasi antar pihak. Kurangnya koordinasi ini mengakibatkan ada informasi yang belum tersampaikan secara maksimal kepada Bagian Tata Pemerintahan dari pihak OPD tertentu.

### 3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan temuan terkait Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Berau, dapat disimpulkan bahwa Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Berau belum sepenuhnya efektif dari beberapa indikator yang telah dijabarkan di atas. Agar dapat melihat hasil temuan lebih jelas, maka peneliti merangkum hasil penelitian dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.4**

#### **Rekapitulasi Hasil Penelitian Efektivitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Berau**

<b>NO</b>	<b>Indikator</b>	<b>Hasil Temuan</b>	<b>Ket.</b>
1	Input: Dana/Anggaran	Dana/Anggaran telah digunakan secara maksimal	Efektif
	Sumber daya manusia	Semua pegawai yang ada di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau yang tercantum di dalam SK Kepala Daerah berperan aktif dalam penyusunan LPPD	Efektif
	Sarana prasarana	Sarana prasarana tersedia dan dimanfaatkan dengan baik	Efektif

	Dasar hukum	Dasar hukum jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mulai dari Undang-Undang hingga SK Tim Pengelola LPPD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	Efektif
2	Proses: Ruang Lingkup	LPPD Kabupaten Berau yang disusun oleh Bagian Tapem Setda Kab. Berau memuat data LPPD secara lengkap	Efektif
	Mekanisme	Mekanisme penyusunan LPPD di Bagian Tapem Setda Kab. Berau sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman penyusunan LPPD oleh Dirjen Otda Kemendagri yang berlaku	Efektif
	Koordinasi antar pihak terkait	Koordinasi belum berjalan secara efektif kepada semua OPD karena ada beberapa OPD yang datanya belum sesuai pedoman dalam hal IKK	Belum Efektif
	Pelaksanaan penyusunan LPPD	Pada tahap penyusunan LPPD, Bagian Tata Pemerintahan menemui masalah atau hambatan dalam hal koordinasi antar pihak terkait, dimana kurangnya koordinasi tersebut mengakibatkan beberapa IKK yang belum terintegrasi. Tidak ada kendala dalam ketepatan waktu pengumpulan LPPD namun terdapat data/dokumen yang diserahkan dari OPD kepada Bagian Tata Pemerintahan belum sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD terbaru.	Belum Efektif
3	Output:  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau yang valid, akurat dan akuntabel	LPPD yang telah disusun oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Berau dapat dipertanggungjawabkan dan berisikan data yang tidak diragukan lagi didukung oleh data dan dokumen yang ada	Efektif

Sumber: Diolah oleh penulis (2024).

Penemuan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa faktor-faktor kunci dalam koordinasi meliputi komunikasi yang baik (Irma dkk 2020), kesadaran akan pentingnya koordinasi (Veneranda Moi, 2021), komitmen dari pihak terkait, kompetensi partisipan, dan insentif koordinasi (Harry Mulya Zein, 2022).

Penemuan ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif Siswandi dimana ditemukan data yang belum sepenuhnya valid di dalam LPPD (Arif Siswandi, 2019) akibat kurangnya koordinasi antar pihak terkait penyusunan LPPD hal ini sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jerico yang menyebutkan adanya pola koordinasi yang belum maksimal (Jerico Izal Hazala, 2021).



Permasalahan terkait IKK juga muncul dalam penelitian sebelumnya bahwa IKK yang yang dibutuhkan di dalam LPPD belum seratus persen akurat dan valid sebab kurangnya koordinasi (Irma dkk, 2022) maupun pemahaman dari pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan LPPD (Nindy Syafrilla, 2021).

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau belum berjalan efektif secara keseluruhan. Meskipun tidak ada kendala dalam tenggat waktu pengumpulan LPPD kepada Gubernur, namun pada hasil EPPD terhadap LPPD Kabupaten Berau tahun anggaran 2023 ditemukan 21 IKK *Output* yang belum sesuai menurut pedoman penyusunan LPPD tahun 2023 yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pihak penyusun LPPD di Kabupaten Berau. Belum terintegrasinya Indikator Kinerja Kunci yang berubah sebab terjadi perubahan dalam pedoman penyusunan LPPD terbaru. Masih ada OPD yang menerapkan dokumen perencanaan anggaran tahun sebelumnya sehingga harus dilakukan koreksi dan perbaikan. Perbaikan tersebut akhirnya menyebabkan waktu pengumpulan data OPD kepada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau masih belum tepat sesuai jadwal. Untuk itu, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Berau melakukan upaya diantaranya mengaktifkan kegiatan rapat koordinasi, melibatkan unsur pimpinan yang berkomitmen dalam mendukung proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau, meningkatkan kapasitas pegawai perangkat daerah, dan sinkronisasi program kegiatan guna meningkatkan efektivitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### **V. UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih ditujukan kepada Asistem Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Berau beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan penelitian. Kemudian kepada seluruh pihak yang turut andil membantu dalam kelancaran dan kesuksesan penelitian yang telah dilaksanakan.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

Alfian, M. (2016). *Faktor Pendukung Implemetasi SIMDA dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Kulon Progo*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 18(3), 119.  
<https://doi.org/10.24914/jeb.v18i3.277>

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1995)

Fauzi, A. (2019). *Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik*. Spektrum Hukum, 16(1), 119.  
<https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>

- Fitriani, F., Alam, S., & Alwany, H. (2022). Pengaruh Pemberian Insentif, Kualitas Sdm Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Local Contact Penyedia Data Lppd Kabupaten Gowa. *Cash Flow Jurnal Manajemen*, 1(1), 161–170.  
<https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/jcf/article/view/3304>
- Hazala, J. (2023). Efektivitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. *Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi*, 5(1), 92-112.  
<https://doi.org/10.33701/jmb.v5i1>
- Moi, V. (2021). Determinasi Penghambat Kualitas Penyusunan Lppd Biro Pemeritahan Sekertariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Cendekia Jaya*, 3(2), 95-115.  
<https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.193>
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moenir. (2008). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Mutiahsari, Irma. (2022). *Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 di Pemerintah Kota Pangkalpinang*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, May, 4(4), 2124-2132.  
<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1018>
- Nurhasanah. (2020). *Efektivitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Ilir*. *Jurnal Administrasi Publik*, 25(02), 82-102.  
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2202086>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta
- Siswandi, Arif (2019) *Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara*. Masters thesis, Universitas Terbuka.  
<https://repository.ut.ac.id/8717/1/43732.pdf>
- Steers, Richard M. (2000). *Efektivitas Organisasi (Kaidah Tingkah Laku)*. Jakarta: LP3ES
- Syafrilla, Nindya (2021). *Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta*. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG)*, 5(2), 125-147.  
<https://doi.org/10.47431/jirreg.v5i2.141>
- Zein, HM. (2022). *Pemerintah Daerah dalam Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. *Public Service and Governance Journal*, 3(1), 102–111.  
<https://doi.org/10.56444/psgj.v3i1.1161>